

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang maupun negara maju di dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan sampah bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan saja, tetapi sudah menjadi masalah sosial yang lingkupnya nasional dan berpotensi menimbulkan konflik (Damanhuri, 2010). Sampah juga berpotensi menjadi masalah sosial yang dihadapi setiap orang. Penimbunan sampah dapat menimbulkan gangguan lingkungan, seperti bau busuk, adanya senyawa beracun atau senyawa yang bisa merusak kesehatan. Untuk itu diperlukan penanganan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak dan semua kalangan yang ada dalam masyarakat daerah tersebut, karena persoalan lingkungan atau persoalan sampah mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain untuk ditangani.

Pertumbuhan penduduk telah menimbulkan peningkatan jumlah produksi sampah. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya berujung pada bertambahnya volume sampah. Kondisi ini diperparah dengan pola hidup masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan disingkirkan. Sampah juga dirasa sebagai barang yang tidak memiliki nilai dan hanya merusak lingkungan karena ketidapkahaman masyarakat tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan

baik dan dapat dijadikan barang yang memiliki nilai ekonomis. Adapun produksi sampah selama 3 tahun terakhir di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1.
Jumlah Sampah di Indonesia Tahun 2017-2019

TAHUN	JUMLAH SAMPAH (VOLUME)
2017	65,8 Juta Ton Sampah
2018	64 Juta Ton sampah
2019	67 Juta Ton Sampah

(Sumber: Badan Pusat Statiska/2019)

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa produksi sampah di Indonesia bertambah hingga 3 juta ton sampah dalam kurun waktu 1 tahun dan tahun 2019 menjadi tahun dimana produksi sampah sangat tinggi.

Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 327 juta jiwa. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah produksi sampah setiap harinya. Produksi sampah di Indonesia, diperkirakan akan mencapai angka 130.000ton perhari pada tahun 2025. Ancaman itu bukan tanpa alasan. Pasalnya aktivitas masyarakat pada umumnya menuntut untuk selalu berhubungan dengan makanan dalam kemasan. Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lingkungan Hidup, Indonesia telah menghasilkan sampah sekitar 66 - 67 juta ton sampah pada tahun 2019 (<https://www.bps.go.id/subject/152/lingkungan-hidup.html>). Sebagai bentuk mitigasi dan penanganan yang dilakukan, pemerintah meyiapkan system untuk menjaga persebaran sampah agar tidak sampai pada titik bahaya. Sistem

pengolahan sampah di Indonesia umumnya masih terbelang tradisional ini seringkali akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Pada dasarnya pengolahan sampah difokuskan pada TPS (Tempat pengolahan sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal penanganan sampah.

Persampahan merupakan isu penting khususnya di daerah daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah dimana jumlah penduduk di daerah ini terbelang cukup banyak dan relatif padat. Kehidupan manusia dengan semua aktivitasnya tidak terlepas dengan namanya sampah. Karena sampah merupakan hasil dari adanya aktivitas manusia baik berupa aktivitas rumahan maupun aktivitas industri. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk di suatu tempat tentunya akan semakin bertambah dan perkembangan teknologi semakin canggih serta pertumbuhan industry juga cukup pesat sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam.

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Per hari, sampah di seluruh Jawa Tengah ini total mencapai 15.671 ton. Artinya jika dihitung dalam kurun waktu satu tahun, jumlah produksi sampah mencapai 5,7 juta ton. (<http://data.jatengprov.go.id/dataset?tags=sampah>). Jika tidak ditangani dengan tepat dan sigap melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pemangku kepentingan, volume sampah ini berpotensi menjadi bencana nasional.

Sampah-sampah yang ada di Provinsi Jawa tengah, bersumber dari berbagai kegiatan masyarakat seperti industri, rumah tangga, pelayanan perkotaan, konstruksi, pembongkaran dan atau pertanian menjadi suatu kewajiban untuk segera ditangani. Adapun jumlah sampah dalam 2 tahun terakhir di provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2.
Jumlah Sampah di Jawa Tengah Tahun 2017-2018

TAHUN	JUMLAH SAMPAH (VOLUME)
2017	3.431.949 Ton
2018	5.719.915 Ton

(Sumber: Badan Pusat Statiska/<http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data-umum>)

Tabel 1.2 menunjukkan adanya peningkatan jumlah sampah di Jawa Tengah dalam setahun terakhir sebesar 2 juta ton, dan jumlah ini diprediksikan akan terus meningkat. Oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus terkait kondisi sampah di Jawa Tengah. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani sampah di Jawa Tengah adalah melalui penggalakan bank sampah ditiap daerah di Jawa Tengah.

Kota Semarang merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang tengah gencar dalam menggalakan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Sejak adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, masyarakat sudah mulai kenal dengan metode bank sampah. Di kota semarang tercatat terdapat 220 bank sampah aktif yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagai strategi penanganan sampah untuk lingkungan. Persebaran bank sampah ini dikhususkan pada tingkat kelurahan dengan harapan dapat menangani permasalahan sampah ditingkat paling rendah yaitu rumah tangga. Jumlah bank sampah ini melebihi dari jumlah kelurahan yang ada di Kota Semarang. Jumlah bank sampah di Kota Semarang yang cukup banyak, dikarenakan jumlah produksi sampah yang jumlahnya juga tinggi. Adapun sampah-sampah di Kota Semarang bersumber dari berbagai macam kegiatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3.
Sumber Sampah Harian Masyarakat di Kota Semarang Tahun 2018

Sumber	Fasilitas,Aktifitas,Lokasi Sampah Dihasilkan	Tipe Sampah
Perumahan	Keluarga kecil atau beberapa keluarga tinggal bersama, apartemen kecil, menengah, dan tingkat tinggi	Sampah makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, kaleng timah, aluminium, logam lainnya, debu daun dari jalan, sampah khusus (termasuk barang-barang besar, elektronik, barang

Sumber	Fasilitas,Aktifitas,Lokasi Sampah Dihasilkan	Tipe Sampah
		elektronik besar, sampah kebun yang dikumpulkan terpisah; batere, oli dan ban), sampah rumah tangga berbahaya.
Komersil	Toko, restoran, pasar, bangunan kantor, hotel, motel, percekatan unit pelayanan, bengke, dan lain-lain	Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus (lihat di atas) sampah berbahaya, dan lain-lain.
Institusi	Sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan	Kertas, kardus, plastik, kayu, sampah makanan, kaca, logam, sampah khusus (lihat di atas) sampah berbahaya, dan lain-lain
Konstruksi dan pembongkaran	Area konstruksi baru, area renovasi/ perbaikan jalan, peruntuhan bangunan, Kayu, baja, beton, tanah perkerasan yang rusak	Kayu, baja, beton, tanah
Pelayanan perkotaan (tidak	Pembersihan jalan, pertamanan, pembersihan	Sampah khusus, kotoran, hasil penyapuan jalan, sisa penghiasan pohon

Sumber	Fasilitas,Aktifitas,Lokasi Sampah Dihasilkan	Tipe Sampah
termasuk fasilitas pengolahan)	cekungan, area parkir dan pantai, tempat rekreasi lainnya	dan pertamanan, pusing dari cekungan, sampah umum dari area parkir, pantai dan tempat rekreasi.
Unit pengolahan; insinerator kota	Proses pengolahan air, air limbah, indusir, dan lain-lain	Limbah unit pengolahan, pada dasarnya terdiri dari residu lumpur.
Sampah perkotaan	(Seluruh sampah di atas)	(Seluruh sampah di atas)
Industri	Konstruksi, fabrikasi, produksi ringan dan berat, perpipaan, unit kimia, pembangkit energi, pembongkaran dan lain-lain	Limbah proses industri, potongan material, dan lain-lain. Sampah non-industri meliputi sampah makanan, debu, pembongkaran dan konstruksi, sampah khusus, sampah berbahaya.
Pertanian	Tanaman baris, kebun buah-buahan, kebun anggur, produksi susu, penggemukan, peternakan, dan lain-lain.	Sampah makanan yang rusak, sampah pertanian, kotoran, sampah berbahaya.

Sumber: Dokumen Data Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tahun 2018

Melalui metode bank sampah, harapannya masyarakat dapat mengenali sisi positif yang dikemas dalam pemberdayaan. Karena selain mengelola sampah yang tujuannya adalah untuk mengurangi digit konsumsi sampah di Kota Semarang, melalui bank sampah ini masyarakat dapat memperoleh manfaat diantaranya adalah manfaat ekonomi, karena bank sampah menggunakan system tukar dan tabung sampah untuk mendapatkan uang. Sampah yang dikelola tadi juga akan diubah menjadi barang yang bisa didaur ulang dan dapat dipasarkan kembali. Keberhasilan penanganan sampah melalui Bank Sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat didorong untuk berdaya dan memiliki keterampilan dengan adanya pengelolaan sampah yang tujuannya untuk mengurangi penumpukan sampah dan memberikan pelatihan berupa keterampilan serta mengubah barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai guna. Oleh karena itu diperlukan manajemen pemberdayaan yang baik dalam pengelolaan bank sampah tersebut. Berkaitan dengan pentingnya manajemen pemberdayaan dalam pengelolaan bank sampah, maka penanganan sampah di setiap bank sampah yang ada di Kota Semarang perlu dilihat dan diawasi agar dapat berjalan optimal. Pada pelaksanaannya ternyata masih banyak masalah yang sering sekali dijumpai dalam pengelolaan bank sampah ini, terutama berkaitan dengan manajemen dalam pemberdayaannya. Mulai dari pengorganisasian yang tidak jelas hingga system pengawasan yang belum dijalankan.

Melalui pengelolaan bank sampah yang tepat dan benar, masyarakat mendapatkan manfaat dari pengelolaannya. Manajemen dalam pemberdayaan

harus dimulai dari tingkat yang paling awal yaitu perencanaan sampai evaluasi. Sedikit kurang masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan bank sampah. Masyarakat akan terdidik dengan pembelajaran baru. Selain itu tingkat kreatifitas juga akan dipancing dan dirangsang, dan yang tidak kalah penting ada beberapa bank sampah di Kota Semarang yang untuk menjalankan kegiatan operasionalnya didukung oleh CSR terkait. Ini menjadi nilai tambah, selain menangani permasalahan sampah, masyarakat dirangsang untuk berdaya dengan manfaat dari bank sampah itu sendiri. Salah satu bank sampah yang menarik dalam pengelolaannya adalah bank sampah yang berada di Kelurahan Tinjomoyo. Bank Sampah itu bernama Ngudi Lestari, yang sampai saat ini kegiatannya mendapatkan *support* dari PT Pegadaian selaku CSR dalam program pemberdayaan melalui bank sampah. Berbeda dengan bank sampah kebanyakan, Bank Sampah Ngudi Lestari memang disiapkan untuk mendukung program pemberdayaan. Selain ditukarkan dengan uang melalui pendataan buku anggota, masyarakat dapat langsung menabung dan menukarkan dengan emas.

Pengelolaan Bank Sampah Ngudi Lestari sendiri masih dilakukan dengan cara tradisional. Padahal, sarana dan prasarana dalam bank sampah ini terbilang cukup komplit, namun pengelola bank sampah Ngudi Lestari merasa penggunaan alat justru memakan waktu yang lama. Masyarakat lebih memilih untuk mengolah sampah secara manual dengan tangan karena dianggap lebih cepat kerjanya. Pengelolaan yang masih bersifat tradisional ini kemudian menimbulkan permasalahan pada manajemen pemberdayaan yang ada mulai dari pengorganisasiannya hingga tahap pengelolaan sampah itu sendiri.

Permasalahan yang sering kali dijumpai dalam proses pengorganisasian (*Organizing*) di Bank Sampah Ngudi Lestari adalah kesalah pahaman akan instruksi dilapangan. Masyarakat masih sering menyepelekan dan menganggap pendistribusian tugas melalui *Job-Description* dirasa tidak penting dan tidak harus dipatuhi. Ini yang sering menjadi faktor penghambat dalam proses pemberdayaan dan manajemen dalam pemberdayaan. Masyarakat yang tidakmengetahui pentingnya *Job-Description* akan bergerak tanpa aturan, yang artinya porsi yang sebenarnya sudah diberikan kepada seseorang dapat terbengkalai dengan alasan lain suatu hal. Kebanyakan dari mereka berpikiran bahwa bekerja dengan orang – orang pilihan mereka menjadi lebih nyaman. Sementara jika berbicara *Job-Description* kita sudah tidak lagi membahas dengan siapa kita dipasangkan dalam pekerjaan.

Masalah selanjutnya yang dihadapi pengelola Bank Sampah Ngudi Lestari dalam manajemen pemberdayaan melalui bank sampah ini adalah dari sisi manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan menjadi salah satu hal yang dapat menjadi barometer keberhasilan program pemberdayaan. Pada pelaksanaannya pengelolaan masih dilaksanakan dengan cara tradisional, padahal sarana dan prasarana dalam program pemberdayaan melalui bank sampah yang diterima oleh pengelola Bank Sampah Ngudi Lestari cukup lengkap, dan hal ini berlangsung hingga saat ini dan hingga saat ini belum ada system evaluasi yang jelas di Bank Sampah Ngudi Lestari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait manajemen dalam pemberdayaan bank

sampah dan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen dalam pemberdayaan bank sampah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahan masalahnya. Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penulisan ini adalah

1. Bagaimana manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi manajemen dalam pemberdayaan Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a) Secara lebih mendalam dapat menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan hingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik pada khususnya.
- b) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian, khususnya tentang pengentasan kemiskinan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah 'Ngudi Lestari' di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah yang diawasi langsung oleh pusat, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam melakukan pemberdayaan dengan tujuan dapat mengurangi pengangguran dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kota Semarang.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4.
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI
1.	Pengetahuan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga Dan Niat Mendaur Ulang Sampah. (I Made Bayu Dirgantara, 2013).	Pengetahuan mendaur ulang sampah rumah tangga pada partisipan terbentuk dari informasi yang masuk kepada individu melalui stimulus yang diberikan sehingga individu mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai manfaat daur ulang sampah rumah tangga sehingga meningkatkan niat individu untuk mendaur ulang sampah rumah tangganya.	Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang daur ulang sampah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tentang Pengetahuan Mendaur Ulang Sampah Rumah Tangga Dan Niat Mendaur Ulang Sampah yang berfokus pada individu sedangkan dalam penelitian yang akan datang meneliti tentang Pengelolaan Sampah Daur Ulang di lingkungan masyarakat sekitar.

<p>2.</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar). (Muh. Saleh Jastam,2015)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara deskriptif Bank Sampah Pelita Harapan yang terletak di Kelurahan Ballaparang dapat meningkatkan upaya pembangunan wilayahnya dengan memberdayakan masyarakatnya untuk mengelola sampah melau prinsip 3R. Dari segi pelaksanaan teknis dan kelembagaan pada bank sampah tersebut sudah memenuhi standar kelayakan beroperasi. Dan banyak manfaat yang diperoleh dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut, yakni manfaat ekologis, ekonomis maupun secara spiritual.</p>	<p>Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat yang dengan adanya bank sampah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tentang meningkatkan upaya pembangunan wilayahnya dengan memberdayakan masyarakatnya untuk mengelola sampah. Sedangkan dalam penelitian yang akan datang meneliti tentang pemberdayaan masyarakat</p>
-----------	---	--	---

3.	Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala) Mohamad Rizal, 2011.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan persampahan di Kota Donggala menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat seperti kegiatan sosialisasi masih sangat kurang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kategori sedang. Demikian pula indikator yang berkenaan dengan tingkat pendidikan staf dan tenaga kebersihan, yang masih menunjukkan persentasi kurang memadai yang masih cukup besar	Relevansinya dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu jika penelitian terdahulu meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah. Sedangkan dalam penelitian yang akan datang meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah daur ulang.
----	---	---	--

1.5.2 Administrasi Publik

Secara etimologi administrasi publik berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu *ad* dan *ministrare* yang berarti *to serve* yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. Sedangkan publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat.

Beberapa ahli memberikan definisi pada administrasi publik diantaranya sebagai berikut:

Menurut Felix A. Nigro Public Administration adalah: Usaha kelompok yang bersifat cooperative di lingkungan pemerintah, meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah, eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya, mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politik, amat berbeda dengan administrasi privat, dan berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan publik.

1. Menurut Chandler & Plano (dalam Pasolong 2014:7) administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
2. Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong 2014:8) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Dari beberapa definisi administrasi publik di atas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Thomas S. Khun (dalam Pasolong, 2014:27) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Sedangkan menurut Robert T Golembiewski (dalam Pasolong, 2014:28) menganggap bahwa paradigma adalah standar atau suatu disiplin ilmu dapat dilihat dari fokus dan lokus. Lokus yang dimaksud adalah tempat/letak dari kelembagaan administrasi publik. Sedangkan fokus adalah sesuatu yang dikhususkan bagi atau dari administrasi publik.

Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:28) mengemukakan 5 (lima) paradigma administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1990-1926)

Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi negara ini berada. Pada masa ini dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Tonggak sejarah sebagai momentum dari fase ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonald D. White di dalam bukunya *Politics and Administration*, ia berpendapat bahwa ada 2 (dua) fungsi pokok pemerintahan yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok yang dimaksud adalah politik dan administrasi.

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada paradigma ini lokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini karena yang lebih dipentingkan adalah fokusnya yaitu prinsip-prinsip administrasi, dipandang dapat berlaku universal pada setiap

bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsipnya adalah administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja walaupun berbeda kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick & Urwick (dalam Pasolong, 2014:29) adalah POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgetting*).

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharainya kembali penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Pendek kata; tahap penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan usaha menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Ada dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang cukup mencerminkan adanya perbedaan dalam masalah cara mengurangi ketegangan antara para ilmuwan administrasi dan ilmuwan politik secara berangsur-angsur: peningkatan penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, perbandingan dan pembangunan administrasi yang mana mengalami pasang surut sebagai sub-bidang administrasi negara. Administrasi negara lintas budaya (*crosscultural public administration*) yang disebut juga pendekatan komparatif, merupakan bidang baru dari administrasi negara. Perbandingan administrasi negara,

sebagaimana diterangkan Ferrel Heady, memusatkan pada lima permasalahan motivasi sebagai kegiatan ilmiah; pencarian teori; dorongan bagi aplikasi praktis; sumbangan bagi perluasan perbandingan politik; perlunya peneliti yang terlatih dalam tradisi hukum administrasi; dan analisa perbandingan berbagai berbagai masalah administrasi yang ada. Administrasi negara mempunyai dua perbedaan, dengan masing-masing mempunyai kajian perbandingan sub-bidangnya.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970)

Pada masa ini administrasi negara telah berkembang sebagai ilmu administrasi. Perkembangan ini diawali dengan ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan *focus*, tetapi tidak ada *locusnya*.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-Sekarang)

Pada masa ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik. Beberapa departemen, fakultas dan akademi baru administrasi negara dan *public affairs* bermunculan. Salah satu bentuk *trend* dari pertumbuhan administrasi negara ini adalah terbentuknya asosiasi nasional dari fakultas-fakultas tersebut (*The National Association Of School Of Public Affairs And Administration*). Administrasi negara semakin menonjol bukan hanya karena diakui kalangan universitas sebagai bidang akademik yang tersendiri (di banyak tempat, ilmu ini tak hanya diajarkan

sebagai sebuah jurusan, tapi bahkan berupa sebuah perguruan tinggi tersendiri), tapi bidang itu sendiri merupakan getaran semangat akademik, dan merupakan isyarat awal dari perubahan sosial. Jika negara harus ditangani dengan baik, menurut Rektor Harvard, Bok, maka pihak universitas harus berperan langsung dalam proses pembentukan sikap dan pemikiran para abdi negara tersebut.

Administrasi publik bisa dikatakan sebagai usaha aparat pemerintah atau eksekutif dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan layanan. Agar pekerjaan dapat terselenggara dengan baik dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai maka diperlukan sumber daya manusia atau aparat yang menyelenggarakannya. Administrasi publik berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum. Dalam menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum tersebut tentu membutuhkan suatu proses manajemen publik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan.

1.5.3 Manajemen Publik

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak

menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta.

Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.

Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.

Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.

Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang samabagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.

Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.

Pada dasarnya manajemen publik yaitu manajemen instansi Pemerintah. Overman (dalam Pasolong, 2014:83) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain.

Proses penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan suatu proses manajemen publik seperti perencanaan, pengorganisasiaan, dan pengontrolan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam suatu instansi. Manajemen publik bisa dikatakan sebagai suatu proses menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Organisasi publik dalam mengimplementasikan kebijakan publik perlu adanya perencanaan, pengorganisasiaan, dan pengontrolan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dalam rangka menelenggarakan pelayanan publik.

1.5.4 Manajemen

Pengertian manajemen didefinisikan secara beragam oleh para pakar, seperti yang sering ditemukan dalam beberapa tulisan dan literatur tentang studi manajemen. Beberapa pendapat tersebut antara lain adalah:

1. G.R Terry (1960) Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.
2. John M Prifner (1960) Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugas –tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi – definisi yang telah dikemukakan, seorang manajer akan dinilai berhasil, apabila dalam mencapai tujuan ia mampu menggerakkan orang lain dan mengelola sumber-sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini akan melihat konsep manajemen pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep manajemen yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan.

Manajemen sendiri memiliki beberapa fungsi-fungsi dalam suatu organisasi, banyak ahli yang mencoba menguraikan pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut salah satunya G.R Terry (2013: 21-26) menyatakan bahwa terdapat empat fungsi manajemen yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan), merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam organisasi yang berisi kegiatan penetapan tujuan organisasi, penentuan

strategi atau langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut.

- b. *Organizing* (Pengorganisasian), yaitu kegiatan mengembangkan suatu organisasi agar mampu melaksanakan langkah-langkah yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya organisasi yang dimiliki. Pada dasarnya dalam pengorganisasian terdapat kegiatan pemberian tugas, pendelegasian wewenang, melakukan koordinasi antara atasan dan bawahan dalam mencapai tujuan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mengkoordinasikan hal-hal yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan.
- c. *Actuating* (Pengarahan), adalah kegiatan untuk membuat bawahan melakukan hal-hal yang diinginkan atau yang harus dilakukan. Sehingga dalam fungsi ini mencakup tindakan seorang manajer dalam mempengaruhi bawahannya agar mau melakukan hal-hal yang diinginkan demi mencapai tujuan organisasinya. Fungsi *Actuating* juga memiliki istilah lain seperti *leading, motivating, directing, commanding* dan lain-lain.
- d. *Controlling* (Pengawasan), merupakan fungsi yang dapat dikatakan penting dalam sebuah organisasi, sebab tanpa pengawasan fungsi-fungsi sebelumnya tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan adanya pengawasan adalah untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dan dilakukan sudah berjalan dengan baik dan mendorong terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Selain untuk melihat sejauh mana suatu hal yang telah ditetapkan sudah berjalan, fungsi pengawasan juga bertujuan untuk memastikan hal yang sudah dilakukan tidak melenceng dari tujuan yang ada. Pada dasarnya di

dalam fungsi pengawasan terdapat kegiatan monitoring, evaluasi, pengecekan hasil kerja, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Hasil dari fungsi pengawasan selanjutnya digunakan untuk pedoman perumusan perencanaan kedepannya.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut membentuk siklus yang saling berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan hingga pengawasan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan manajemen suatu organisasi.

1.6 Pemberdayaan Masyarakat

1.6.1 Pemberdayaan

Dalam perkembangan terakhir konsep-konsep pembangunan, pendekatan pemberdayaan masyarakat kiranya telah menjadi sebuah arus utama yang senantiasa dikedepankan. Berdasarkan filosofinya, pendekatan ini memang lebih memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi aktor dan subyek pembangunan, bukan hanya menjadi obyek. Namun demikian, dalam implementasinya tidak semuanya konsisten dengan prinsip tersebut. Tidak sedikit yang menempatkan pemberdayaan sekedar sebagai label dan retorika, sehingga secara substansial masyarakat masih dianggap sebagai obyek. Jadi, selama masih dibedakan antara yang membangun dan yang dibangun, antara yang diberdayakan dengan yang memberdayakan, selama itu pula masih terbuka peluang menempatkan masyarakat sebagai obyek. (Soetomo,2012)

Menurut Anwas (Dr. Oos M. anwas, 2013) dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, mengartikan pemberdayaan dalam

konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya (. Oos M. anwas, 2013).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan

tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan sesungguhnya merupakan upaya sadar memerdekakan manusia dari ketidakberdayaan, kemiskinan, dan kebodohan. Apabila keberdayaan dipahami sebagai upaya membebaskan manusia dan masyarakat secara sistematis dari tiga hal tersebut, maka manusia dan juga masyarakat akan keluar dari jeratan kemiskinan. (Randy R. Wrihatnolo, 2007).

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh

masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Oos M. anwas, 2013).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digalidan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang

maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Edi Suharto, 2010) Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat.

Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada asas ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utam dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suharto, 2010). faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh (Sumaryadi 2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

1. Kesiapan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.

2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpolakan dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya resource yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

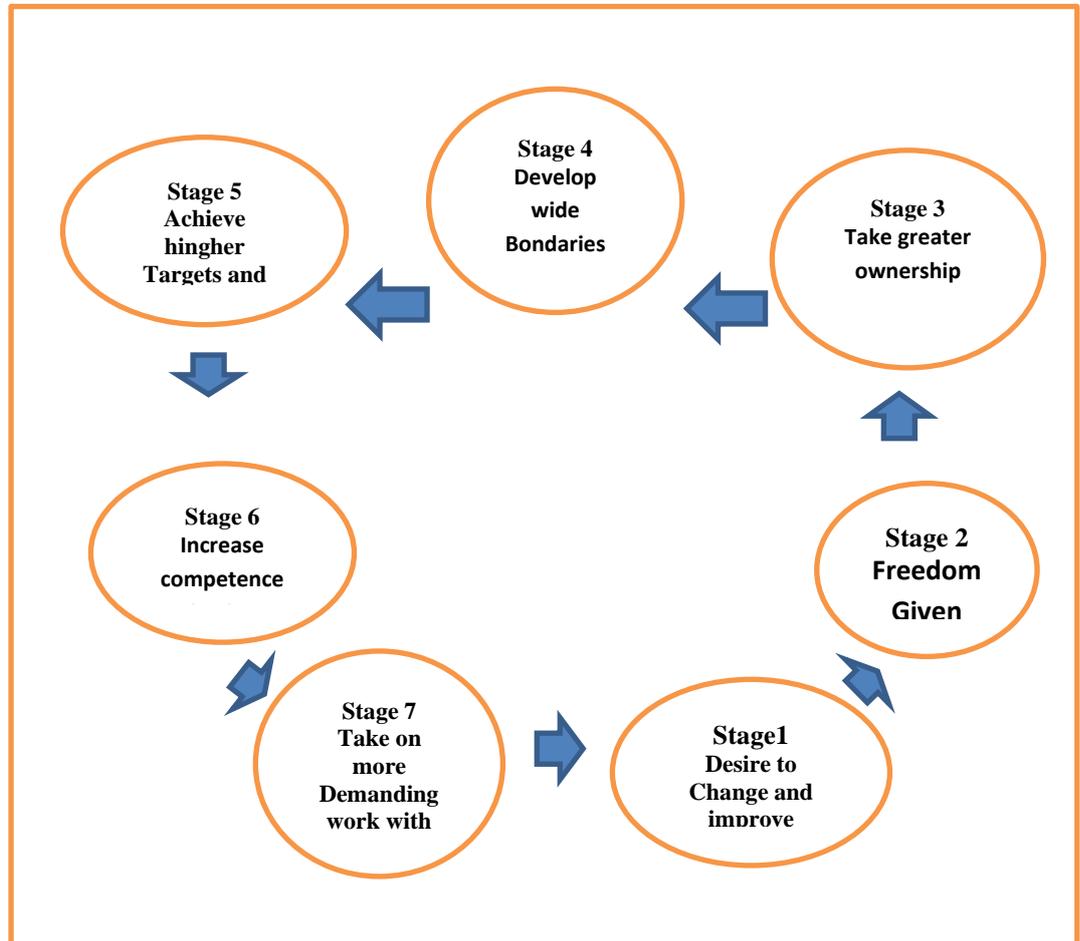
Melihat definisi dari para tokoh tersebut pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memandirikan masyarakat melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya yang dimiliki agar memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan derajat martabat masyarakat tersebut, yang semula tidak mampu menjadi mampu.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi menurut Totok Mardikanto (2013: 30), yaitu:

1. **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
2. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Perkuatan tersebut meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. **Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Wilson dalam Nyoman S. (2005:106) kemudian mengembangkan model-model sederhana dalam lingkaran pemberdayaan (*empowerment circle*), sebagai berikut

Gambar 1. 1.
The Empowerment Circle menurut Therry Wilson (1996)



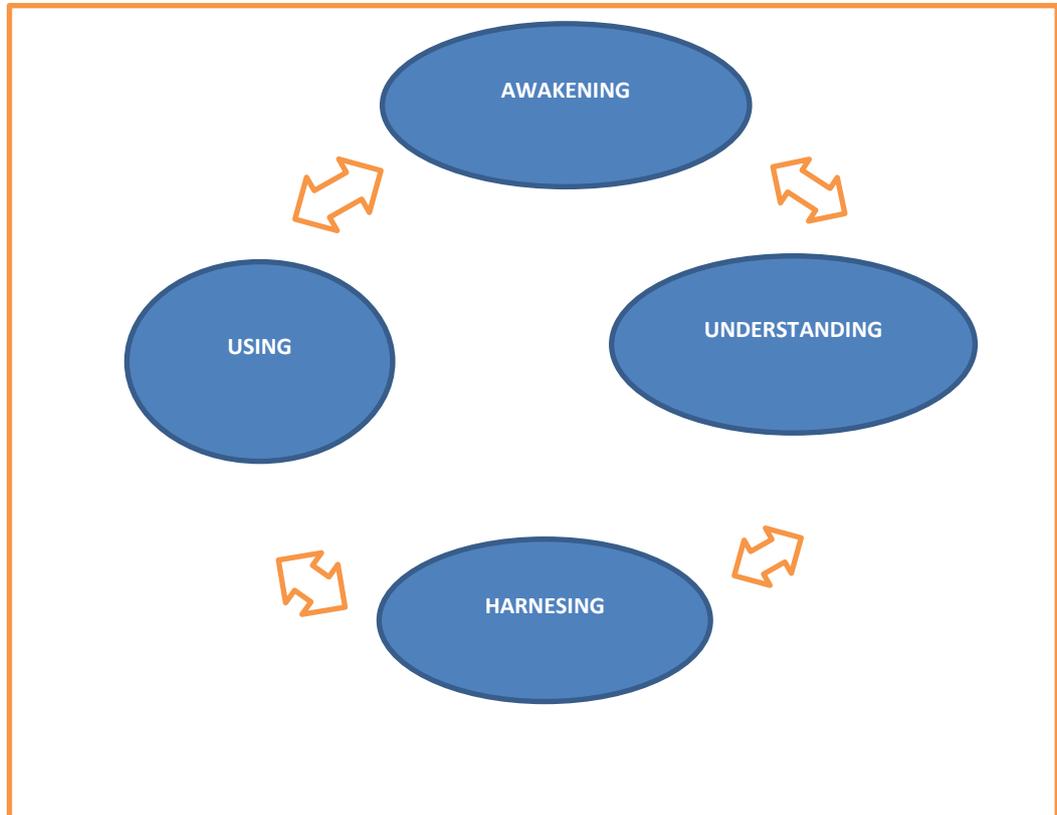
Sumber: Nyoman Sumaryadi (2005:107)

Seperti yang terdapat pada Gambar 1.1 dalam *empowerment circle* Wilson menunjukkan *the nature of empowerment* yang bekerja dalam suatu organisasi. Proses tersebut terdiri dari 7 langkah atau tahapan, proses tersebut berawal dari keinginan untuk berubah dan memperbaiki (*the desire to change and improve*) hingga *Take on moro Demanding work with Higher risks* (Sumaryadi, 2005:107-108).

Tahap Pertama adalah *the desire to change and improve*, merupakan tahap individu atau organisasi ingin melakukan perubahan dan memperbaiki diri.

Berlanjut pada Tahap Kedua, yakni individu atau organisasi melepaskan halangan atau hambatan yang ditemukan dalam melakukan perubahan. Memasuki Tahap Ketiga, individu mulai merasa memiliki tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Tahap Keempat individu mulai memiliki keinginan untuk menambah peran dan tanggung jawab mereka. Tahap Kelima adalah tahap dimana hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai nampak yang mengakibatkan kinerja yang lebih tinggi, menghasilkan peningkatan motivasi dalam mencapai target. Tahap Keenam terjadi perubahan perilaku dan sikap yang signifikan pada seorang individu, sehingga muncul kompetensi diantara individu. Tahap Ketujuh memperlihatkan bahwa seseorang telah menguasai pekerjaan mereka yang ada dan sedang mencari lebih banyak tantangan, sehingga memicu untuk melakukan perubahan kembali. Mewujudkan pemberdayaan yang berhasil, pasti melalui banyak proses yang harus ditempuh. Menurut Wilson (dalam Nyoman S., 2005:130) menyatakan ada 4 tahap proses pemberdayaan sebagai berikut:

Gambar 1. 2.
Empowerment Process menurut Terry Wilson (1996)



Sumber: Nyoman Sumaryadi (2005: 130)

Tahap pertama berawal dari proses pemberdayaan individu adalah *awakening* merupakan proses pemberdayaan untuk mendorong individu menerima tantangan pemberdayaan. Tahap kedua dari pemberdayaan adalah *understanding*, yaitu memunculkan pemahaman dan persepsi baru yang sudah mereka dapat mengenai diri mereka sendiri, pekerjaan, aspirasi dan keadaan umum mereka, sehingga tau apa yang dibutuhkan dalam pemberdayaan dan pemberdayaan seperti apa yang akan dilakukan. Tahap ketiga dari proses pemberdayaan adalah *harnessing*, dalam tahap ini individu, merupakan tahap

individu memutuskan seperti apa menggunakan ketrampilan yang dimiliki dalam pemberdayaan.

Tahap terakhir adalah *using* yakni menggunakan ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam pemberdayaan sebagai kebiasaan. Selain pemberdayaan harus dilakukan berdasarkan pada proses pemberdayaan juga memiliki beberapa ruang lingkup. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwasanya pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan samapai tercapai keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat selaku yang diperintah.

1.6.2 Pembangunan Berbasis Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*). Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan

Pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi

rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menterjemahkan rumusan menjadi kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijakan publik (*public policy*) dengan baik, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam pemahaman ini, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan iklim yang menunjang.

Banyak program pembangunan yang manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat pada lapisan bawah. Salah satu penyebabnya adalah program tersebut kurang relevan dengan persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal itu merupakan konsekuensi logis karena dalam perumusan dan penentuan program, masyarakat pada tingkat terbawah tidak diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi, kepentingan dan kebutuhan mereka tidak terakomodasi dalam program (Soetomo, 2011:70).

Sesuai dengan namanya sebagai pembangunan berbasis masyarakat, atau pembangunan yang berpusat pada rakyat, maka pendekatan yang digunakan lebih memberi tempat pada aspek manusia, sehingga lebih bersifat humanistik. Salah satu implementasi yang penting adalah menempatkan masyarakat lebih sebagai subyek, sebagai aktor pembangunan. Penempatan masyarakat sebagai sekedar obyek pembangunan adalah perlakuan yang tidak manusiawi, oleh karena disamping mengingkari harkat dan martabat manusia juga mengingkari kapasitas manusia sebagai makhluk yang bersifat aktif dan kreatif termasuk dalam menanggapi persoalan dirinya dan persoalan disekitar kehidupannya.

1.6.3 Pemberdayaan Sebagai Proses

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas).

Selaras dengan perkembangan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat alami atau disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi lingkungan fisik maupun perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah atau perilaku manusia di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, kebutuhan manusia juga semakin berubah, baik dalam ragam jumlah, dan bentuk-bentuk kebutuhannya. Pada masyarakat yang masih sederhana mereka hanya membutuhkan tiga macam kebutuhan pokok yang berupa pangan/makan, sandang/pakaian, dan papan/pemukiman. Tetapi dengan berkembangnya peradaban (pengetahuan, keinginan, aspirasi, atau harapan-harapan, teknologi yang digunakan) kebutuhan pokok itu terus berubah dan bertambah dengan pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi dan sebagainya.

Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, Lippit dkk (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:64) mengemukakan bahwa, peradaban yang disebabkan oleh perilaku manusia itu, pada dasarnya disebabkan dua hal, yaitu:

1. Adanya keinginan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhan kebutuhan yang semakin berubah, dan atau keinginan mereka untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dengan memodifikasi atau memanipulasi sumberdaya dan lingkungan di sekelilingnya, melalui penetapan ilmu pengetahuan yang dikuasainya;
2. Adanya atau telah ditemukannya inovasi-inovasi yang memberikan peluang atau menumbuhkan aspirasi-aspirasi baru bagi setiap manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan atau memperbaiki kesejahteraan hidupnya, tanpa harus mengganggu lingkungan aslinya.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan memerlukan inovasi yang berupa ide-ide, produk, gagasan, metoda, peralatan atau teknologi. Inovasi dapat dikembangkan melalui kajian, pengakuan atau pengembangan terhadap kebiasaan, nilai-nilai tradisi, kearifan lokal atau kearifan tradisional. Disamping itu, pemberdayaan sebagai proses perubahan mensyaratkan fasilitator yang kompeten dan memiliki integritas tinggi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat yang akan difasilitasi. Fasilitator terdiri dari aparat pemerintah (PNS), aktivis LSM, atau tokoh masyarakat/warga setempat.

Di banyak negara sedang berkembang prespektif pertumbuhan sering berkolaborasi dengan pendekatan stabilitas terutama stabilitas politik dan keamanan. Dengan demikian dapat dimaklumi apabila dalam operasionalisasinya negara/pemerintah merupakan pemegang kendali dan kontrol utama. Implementasinya tertuang dalam pendekatan yang bersifat sentralistis, *to-down* dan berorientasi keseragaman (*uniformity*). Sebagai anti tesis dari prespektif

pertumbuhan, maka dalam proses pemberdayaan masyarakat, pendekatan yang digunakan cenderung merupakan kebalikannya, yaitu:

1. Sentralisasi menjadi Desentralisasi

Apabila prespektif sebelumnya menggunakan pendekatan sentralistis yaitu dimana kewenangan pemerintah pusat sangat besar dalam proses pengambilan keputusan, proses pemberdayaan masyarakat mengutamakan desentralisasi. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumberdaya. Apabila kewenangan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan masih bias elit, berarti masih ada unsur sentralisasi pada tingkat masyarakat lokal.

2. *Top-down* menjadi *Bottom-up*

Pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas. Dalam hal ini perumusan program yang akan dilaksanakan ditentukan oleh identifikasi masalah dan kebutuhan dari dan oleh masyarakat sendiri. Proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat dapat melalui dua kemungkinan,

- (1) Identifikasi masalah dan kebutuhan dari masyarakat direspon oleh masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Dapat dikatakan bahwa proses pembangunan masyarakat berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Melalui proses pertama ini terbentuk pola tindakan bersama

yang melembaga (*institution*) dan masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan serta kearifan lokal;

- (2) Identifikasi masalah dan kebutuhan dari bawah ini diakomodasikan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, dalam hal ini dinas dinas terkait untuk dimasukan sebagai mata program dalam perencanaan pembangunan. Bentuk kedua inilah yang kemudian dikenal dengan proses dan mekanisme pembangunan yang bersifat *bottom-up*.

Dalam mekanisme yang bersifat *bottom-up*, perencanaan pembangunan yang digunakan adalah model perencanaan partisipatif. Isu yang akan menjadi mata program dalam perencanaan digali dari bawah yang diyakini sebagai masalah dan kebutuhan nyata masyarakat. Model ini bertolak belakang dengan model perencanaan yang bersifat *top-down*, yaitu perencanaan bersifat teknokratik. Jadi perencanaan dibuat secara terpusat oleh para perencana profesional yang merupakan aparat pemerintah. Yang banyak terjadi pada masa *top-down* adalah perencanaan lebih banyak didasarkan asumsi-asumsi diatas meja.

Sebaliknya, model perencanaan partisipatif diharapkan memiliki beberapa keuntungan. Masyarakat sendiri yang dianggap paling tahu kebutuhan, permasalahan dan potensi yang dimiliki, dengan demikian program yang dirumuskan akan lebih tepat sasaran karena mempunyai relevansi yang tinggi dengan permasalahan, kebutuhan dan kondisi nyata.

3. *Uniformity* (Keseragaman) Menjadi Variasi Lokal

Pola pelaksanaan pembangunan masyarakat yang cocok dan berhasil diterapkan dalam masyarakat tertentu, tidak ada jaminan untuk berhasil juga dalam masyarakat lain yang berbeda kondisinya. Oleh sebab itu, penyeragaman pola yang digunakan akan mengakibatkan pemborosan, karena program yang dilaksanakan tidak relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Kenyataan ini bertentangan dengan alasan dan dasar yang digunakan oleh pendekatan *uniformity* itu sendiri, karena penyeragaman dilakukan dengan alasan demi efisiensi dalam pelaksanaannya.

Pendekatan pemberdayaan sangat memberikan toleransi kepada variasi lokal, dengan demikian program-program yang dirumuskan akan dilaksanakan sangat berorientasi pada permasalahan dan kondisi serta potensi setempat. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensi suatu program pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh relevansinya dengan kebutuhan, persoalan aktual, kondisi dan potensi masyarakatnya.

4. Sistem Komando menjadi Proses Belajar

Pelaksanaan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendekatan pemberdayaan, bukan lagi menggunakan sistem instruktif dan komando, melainkan mengedepankan pengambilan keputusan oleh masyarakat. Kewenangan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perlu diimbangi dengan kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya. Dalam pendekatan pemberdayaan, masyarakat lebih berkedudukan sebagai subyek atau aktor, berbeda dengan sebelumnya yang lebih ditempatkan sebagai obyek.

5. Ketergantungan menjadi Keberlanjutan

Penerapan sistem komando yang bersifat instruktif sebagai dampak dari pendekatan *top-down*, membuat masyarakat bersifat menunggu program dari atas. Kenyataannya ini tidak mendidik karena tidak mengandung unsur pengembangan inisiatif dan kreativitas. Yang terjadi bukan munculnya prakarsa lokal sebagai manifestasi dari adanya kompetensi masyarakat terhadap upaya peningkatan taraf hidupnya, melainkan sifat ketergantungan.

Sebaliknya, pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan kreativitas. Hal ini disebabkan karena melalui mekanisme swakelola pembangunan, disadari atau tidak telah terjadi proses bekerja sambil belajar oleh masyarakat. Pihak eksternal baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah peranannya sekedar sebagai stimulant, bukan dominan.

Proses pengelolaan pembangunan oleh masyarakat sendiri dan tindakan bersama untuk peningkatan kehidupan bersama yang merupakan rutinitas kemudian akan diakui keberadaannya, dirasakan manfaatnya dan ditempatkan sebagai bagian dari pola tindakan bersama. Dengan kata lain, mekanisme pengelolaan pembangunan oleh masyarakat sudah terinstitusionalisasi, karena sudah ditempatkan sebagai bagian dari pranata sosial. Maka proses dan mekanisme tersebut akan tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terlepas ada atau tidak stimuli eksternal. Dengan demikian yang terjadi bukan ketergantungan, melainkan keberlanjutan pembangunan.

6. *Social Exclusion* menjadi *Social Inclusion*

Pendekatan yang bersifat sentralistis, *top-down* dan berorientasi keseragaman ternyata telah memarginalkan masyarakat. Marginalisasi dapat dilihat pada tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat makro, telah mengakibatkan masyarakat lokal tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumberdaya, oleh karena semuanya dipusatkan secara terpusat. Sedangkan pada tingkat mikro, marginalisasi dialami oleh lapisan masyarakat tertentu dalam kerangka struktur dan sistem sosialnya. Hal itu disebabkan karena langsung atau tidak langsung masyarakat lapisan bawah telah mengalami diskriminasi, seperti dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumberdaya, peluang dan informasi, dan akses terhadap berbagai bentuk pelayanan. Kondisi seperti itu disebut sebagai *social exclusion*. Kondisi dan mekanisme *social exclusion* dapat menjadi penyebab kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat (Hall and Midgley (dalam Soetomo, 2011:84)).

Pendekatan pemberdayaan berusaha untuk mewujudkan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi *social inclusion*. Itulah sebabnya perubahan yang diharapkan tidak hanya perlakuan pihak eksternal terhadap masyarakat lokal sebagai kesatuan, akan tetapi juga perubahan pola relasi sosial dalam struktur sosial masyarakatnya.

7. *Improvement* menjadi *Transformation*

Dilihat dari keperluan perubahan dalam rangka pembangunan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, level perubahan yang dibutuhkan tergantung dari pemahaman tentang sumber masalahnya, tentang faktor apa yang diyakini menjadi penyebab rendahnya kondisi kesejahteraan. Dalam

kerangka perubahan untuk pembangunan masyarakat, Long (dalam Soetomo, 2011:85) membedakannya menjadi dua, yaitu:

a) *Improvement*

Lebih difokuskan pada perbaikan dalam cara kerja dan proses produksi tanpa melakukan perubahan pada tatanan struktur.

b) *Transformation*

Lebih difokuskan pada perubahan level sistem dan struktur sosialnya. Apabila pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat, maka asumsinya adalah sumber masalahnya terletak pada kondisi ketidakberdayaan. Dalam kehidupan masyarakat, apabila ada lapisan tertentu yang kondisinya tidak berdaya atau termarginalisasi, maka sebetulnya merupakan implikasi dari masalah struktural. Hal ini disebabkan karena dalam struktur dan institusi sosial terdapat unsur diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, perubahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang mengandung unsur transformasi struktural.

1.6.4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Sumadoyo (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2013:113) merumuskan tiga pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutnya Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.

1. Bina Manusia

Bina manusia upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik. Sebab selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen. Termasuk dalam upaya Bina Manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/ pengembangan kapasitas yaitu:

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan.
- b. Pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan, yang meliputi:
 - Kejelasan visi misi, dan budaya organisasi;
 - Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi;
 - Proses organisasi atau pengelolaan organisasi;
 - Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya;
 - Interaksi antar individu di dalam organisasi;
 - Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang lain
- c. Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring), yang meliputi:
 - Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama;
 - Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi diluar sistem.

2. Bina Usaha

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal seperti:

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk;
- b. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan;
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal;
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi;
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

3. Bina Lingkungan

Pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja) maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan. Sedang, yang termasuk tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang

ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1.6.5 Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Wilson (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2013:22) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan / kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;

5. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;
6. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
7. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru

Di lain pihak Sedangkan menurut Soekanto (1987:63) Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan

dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan
6. masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
7. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

8. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Sementara menurut Lippit (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2013:123)

merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pokok yaitu:

1. Penayadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial budaya, ekonomi, dan politik;
2. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan keadaan sumberdaya (alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan, budaya dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial budaya dan politis;
3. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang, ancaman) yang dihadapi;
4. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional, dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus

disiapkan untuk mengantisipasi perubahan tersebut melalui kegiatan perubahan yang terencana.

5. Melakukan pengujian dan demonstrasi, kegiatan uji coba dan demonstrasi sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara teknis, ekonomis, sosial budaya, dan politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Disamping itu uji cobadiperlukan untuk emperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling bermanfaat dengan resiko yang terkecil;
6. Memproduksi dan mempublikasi informasi, baik yang berasal dari luar (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai adat-adat yang lain);
7. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah untuk brsuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya yang berkaitan dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

Tim delivery (dalam Mardiksnto dan Soebianto, 2013:125) menawarkan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Tahap seleksi lokasi

Seleksi wilayah dilakukan dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar

pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan

2. Tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan

3. Proses pemberdayaan masyarakat

Dalam proses pemberdayaan masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji wilayah;
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring dan evaluasi partisipasi.

4. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

1.6.6 Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Bank sampah menurut Unilever adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Pada umumnya Bank merupakan sebuah instansi yang bergerak dibidang penyimpanan, terutama yang berhubungan dengan uang. Namun, belakangan ini bank yang berhubungan dengan uang sudah lain lagi yaitu berhubungan dengan sampah. Bank sampah merupakan sebuah yayasan yang awalnya dibina di daerah Yogyakarta, dan kini sudah diadopsi di kota-kota seluruh Indonesia. Tujuannya tentu saja menerima penyimpanan sampah masyarakat sekitar, dan menjadikan sampah tersebut menjadi uang. Jumlah sampah yang masuk dengan uang yang diterima tentu akan berbeda jauh. Kalau sampah yang masuk banyak, jangan harap uang yang masuk sebanyak sampah yang disetoran. Akan tetapi dari sampah-sampah tersebut kita dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah.

Dari hasil timbangan sampah, pihak bank baru menentukan berapa uang yang bisa diberikan. Kinerjanya mirip dengan bank umumnya. Masyarakat dibuatkan buku tabungan, uang tidak langsung diberikan pada sipe nabung, tetapi

lebih dulu dimasukkan ke dalam buku tabungan. Jumlahnyapun tidak langsung besar, dari mulai rupiah yang kecil dulu. Bank sampah ini fungsinya bukan melulu menumpuk sampah, namun bank ini menyalurkan sampah yang didapat sesuai kebutuhan. Misalnya sampah basah hasil rumah tangga yang terdiri dari sayuran, dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. Sampah kring berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur ulang dan semua berupa kerajinan tangan. Misal, vas bunga dari kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk asbak, dan masih banyak lagi. Semua pengelolaan tersebut diserahkan kepada masyarakat setempat.

Dari masyarakat dan kembali ke masyarakat. Ide tentang bank sampah sungguh unik. Ternyata bank bukan hanya bergerak di bidang uang, tapi juga terhadap benda yang dibuang. Ide untuk menamakan bank sampah membuat *image* tentang pengumpulan barang bekas menjadi berbeda. Dengan begitu prospektif dan terkesan keren. Harus diingat juga perbedaan tersebut juga ternyata berpengaruh besar terhadap ekonomi. Bahkan sampah justru bisa mendatangkan uang dari barang bekas bernama sampah, ditambah lagi memberikan tambahan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan

nilainya sehingga mereka mau memilah sampah. (Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2014).

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan reduce, reuse, recycle sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya pada ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.

Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung

tidak hanya berupa uang. Tetapi ada pula yang berupa bahan makanan pokok seperti gula, sabun, minyak beras, sekolah gratis dan asuransi kesehatan.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Manajemen dalam Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberi daya atau *empowerment* dan penguatan kepada masyarakat. Pemberdayaan terfokus pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. Untuk mendukung masyarakat yang berdaya, pemberdayaan benar-benar harus dikelola dengan baik, maka dari itu dibutuhkan adanya pengelolaan dalam pemberdayaan. Manajemen adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang terakumulasi dan terintegrasi. Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang sebelumnya telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya.

1.7.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan dan kelebihan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidak berhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program

pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial.

Faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan antara lain;

- a) Kesadaran yang timbul dari dalam diri masing – masing.
- b) SDM (Sumber Daya Manusia)
- c) Manajemen pengelolaan
- d) Partisipasi Masyarakat
- e) Kepemimpinan

Kendala yang sering sekali menjadi hambatan dalam pemberdayaan adalah Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. Dibeberapa kesempatan masih terdapat masyarakat yang masih berpikiran untuk lebih memilih membakar sampah dari pada mengelolanya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.

Ketergantungan akan suatu komunitas terhadap orang lain juga menjadi faktor penghambat pemberdayaan. Misalnya terhadap pendamping sosial yang menyebabkan proses pemandirian masyarakat

membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Ketersediaan Bahan yang tidak selalu ada juga menjadi faktor penghambat pemberdayaan selanjutnya.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Untuk melihat upaya manajemen bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo maka peneliti akan menganalisisnya melalui tahapan :

1. Manajemen dalam Pemberdayaan
 - a. Perencanaan (planning) Manajemen dalam Pemberdayaan Bank Sampah dalam proses pemberdayaan yang meliputi awakening, understanding, harnessing, dan using. Menganalisa pada Lingkup Pemberdayaan (Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Usaha)
 - b. Pengorganisasian (organizing) Manajemen dalam Pemberdayaan Bank Sampah dalam proses pemberdayaan yang meliputi awakening, understanding, harnessing, dan using. Menganalisa pada Lingkup Pemberdayaan (Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Usaha).
 - c. Pengarahan (actuating) Manajemen dalam Pemberdayaan Bank Sampah dalam proses pemberdayaan yang meliputi awakening, understanding, harnessing, dan using. Menganalisa pada Lingkup Pemberdayaan (Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Usaha).

- d. Pengawasan (controlling) Manajemen dalam Pemeberdayaan Bank Sampah dalam proses pemberdayaan yang meliputi awakening, understanding, harnessing, dan using. Menganalisa pada Lingkup Pemberdayaan (Bina Manusia, Bina Lingkungan, Bina Usaha).

2. Faktor yang mempengaruhi manajemen dalam pemberdayaan bank sampah dalam pemberdayaan masyarakat antara lain dilihat dari beberapa aspek yakni:

- a) Kesadaran yang timbul dari dalam diri masing – masing.
- b) SDM pengelola Bank Sampah, aparatur terkait yang melakukan pengelolaan kegiatan Bank Sampah.
- c) Manajemen pengelolaan, keefektifan prosedur manajemen dalam pemberdayaan bank sampah.
- d) Partisipasi Masyarakat, berkaitan dengan sikap masyarakat dalam keikutsertaan kegiatan Bank Sampah.
- e) Kepemimpinan, melihat komitmen pemimpin dalam melaksanakan pemberdayaan.

1.9 Metoda Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan dengan melihat fenomena yang ada di lapangan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di lapangan dan

kemudian di konstruksikan menjadi hipotesa atau teori. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara lebih mendalam.

Pada dasarnya tipe penelitian dibagi menjadi dua macam, adapun dua macam penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian Deskriptif, merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.
2. Penelitian Eksploratif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggali data dan informasi tentang topik atau fenomenabarbaru yang ditunjukkan. Tujuan penelitian Eksploratif untuk memutuskan pernyataan – pernyataan yang lebih akurat.

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan, peneliti termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran terperinci mengenai keadaan yang diamati.

Laporan penelitian nantinya akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan situs penelitian di Bank Sampah Ngudi Lestari yang bertempat di kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Penelitian ini mengambil judul tentang “Manajemen dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah ‘Ngudi Lestari’ Di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”. Sebagaimana diketahui sampah adalah masalah yang selalu menjadi permasalahan mendasar di beberapa daerah, tidak terkecuali di Kelurahan Tinjomoyo. Maka dari itu didirikanlah Bank Sampah yang tujuannya untuk menekan adanya sampah yang menumpuk dengan dapat dimanfaatkan sebagai barang ekonomis dan juga dapat membantu perekonomian rakyat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian diskriptif kualitatif informan dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu Kepala Bank Sampah Ngudi Lestari, Staf ahli Dinas Pertanian/Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan bekerja sama dengan PT Pegadaian Persero, masyarakat RW 2, dan kelompok ibu-ibu PKK. Penelitian ini menggunakan teknik menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya berjumlah sedikit,

lama-kelamaan menjadi banyak dan besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. (dalam Sugiyono, 2012: 218-219).

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis, teks gambar, dan bukan angka-angka.

1.9.5 Sumber data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala dari Pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari, Staf ahli Tenaga Kerja Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Lingkungan Hidup/ Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan bekerja sama dengan PT Pegadaian Persero, masyarakat RW 2, dan kelompok ibu-ibu PKK

2. Data Sekunder

Data tidak langsung yang diperoleh dari sumbernya, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Bentuk data sekunder yang dipakai berupa catatan data tentang persampahan, Mekanisme Bank Sampah dalam mengolah sampah menjadi barang yang berdayaguna seperti pupuk cair dari Dinas Pertanian dan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, jurnal, situs dan internet serta laporan yang relevan.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dilapangan terhadap gejala dan permasalahan yang diteliti.

Bentuk observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Ngudi Lestari dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Ngudi Lestari.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono,2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, ide dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Melalui teknik wawancara, peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui

Pengelolaan sampah di Bank Sampah Ngudi Lestari serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dengan *interview guide*. Peneliti memilih informan sesuai dengan ketentuan seperti orang yang jujur dan bisa dipercaya, pejabat berwenang, orang yang suka berbicara dan mengerti tentang teknis Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, kemudian peneliti membuat panduan wawancara (*Interview Guide*).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbebtuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, bagan dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa catatan-catatan, rekaman, dan foto dari informan antara lain Kepala Pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari, Staf Ahli dari Dinas Koperasi dan masyarakat yang terlibat dari proses pemberdayaan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara meneyluruh data yang didapat selama proses penelitian. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui analisis data di lapangan. Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246) menjelaskan bahwa:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini peneliti memilah informasi mana yang relevandan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi, data akan mengerucut semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel disertai uraian penjelas yang bersifat deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2106:252) adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.9.8 Kualitas Data (Goodness Criteria)

Pada penelitian kualitatif harus dapat menunjukkan data yang valid dan reliable dengan melakukan uji keabsahan data. Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Pada penelitian ini, penggunaan teknik triangulasi yang digunakan melingkupi triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner.